

APEL MILAD KE-59 KOKAM BANTUL

Tolak Miras dan Dukung Pilkada Aman



Apel besar Milad ke-59 Kokam di Bantul.

KR-Judiman

BANTUL (KR) - Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Daerah Kabupaten Bantul menggelar apel besar dalam rangka Milad ke-59 Kokam di Lapangan Paseban Bantul, Minggu (27/10). Kegiatan ini diikuti sekitar 800 personel perwakilan Kokam se-Bantul.

Komandan Kokam Daerah Bantul Herwanto Sulistyo Budi ST, mengatakan apel besar Kokam tahun ini selain memperingati Milad ke-59. Ada dua hal yang menjadi perhatian Kokam Bantul, yakni penolakan Miras dan mendukung Pilkada 2024 aman.

Karena itu dalam kesempatan ini Kokam Bantul menyampaikan sikap tegas terkait peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Bantul dan sekitarnya. “Berlandaskan pada ajaran Islam, Kokam menyatakan menolak keras pendiri-

an toko, peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Yogyakarta pada umumnya, dan di Kabupaten Bantul pada khususnya, demi menjaga moral, kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Mendesak Bupati Kabupaten Bantul untuk tidak memberikan izin pendirian toko atau outlet yang memperjual-belikan minuman keras, serta meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meninjau ulang dan melakukan revisi pada Perda Kabupaten Bantul No 04 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan.

Mendesak seluruh anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk aktif mengawasi penerapan Perda Kabupaten Bantul No 04 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan mi-

numan beralkohol dan pelarangan minuman oplosan. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan penertiban dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran minuman keras sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu menolak peredaran dan penjualan minuman keras, serta menentang berdirinya toko atau outlet yang memperdagangkannya,” tegasnya.

Sementara dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan keamanan selama proses Pilkada, Kokam Bantul juga menyampaikan sikap tegas untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai, jujur dan berintegritas. “Mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilukada yang damai, bermartabat dan berintegritas di Kabupaten Bantul,” jelasnya. **(Jdm)-d**

767.208 LEMBAR DALAM KONDISI BAIK Selesai, Sortir dan Lipat Surat Suara Pilkada

BANTUL (KR) - Tahapan sortir dan lipat sebanyak 767.208 surat suara Pilkada Bantul 2024, telah dituntaskan KPU Bantul. “Untuk proses sortir dan lipat surat suara pilkada di gudang logistik KPU Bantul, sudah selesai. Total yang sudah tersortir dalam kondisi baik sebanyak 767.208 surat suara,” jelas Ketua KPU Kabupaten Bantul Joko Santoso, Sabtu (26/10).

Diungkapkan, tahapan sortir dan lipat surat suara mulai Sabtu (19/10) dengan melibatkan tenaga sebanyak 95 orang. Tahapan tersebut selesai pada Kamis (24/10) sehingga KPU butuh waktu 6 hari kerja. Pada Jumat (25/10), dilakukan penghitungan ulang surat suara yang telah tersortir dan terlipat tercatat 767.208 lembar yang dalam kondisi

baik.

“Surat suara yang rusak ditemukan sebanyak 420 lembar, kerusakannya sedang dan berat. Rusak berat seperti lecek dan sobek. Kalau yang rusak sedang itu, seperti di pinggiran yang terpotong,” ungkapnya.

Meski demikian, Joko tidak mengambil langkah untuk mengusulkan penggantian surat suara yang rusak tersebut, sebab surat suara dalam kondisi baik atau layak jumlahnya melebihi dari kebutuhan yang diusulkan KPU Bantul.

KPU Bantul sebelumnya telah mengajukan kebutuhan surat suara Pilkada 2024 sebanyak 765.337 lembar. Namun, yang dikirim ke gudang logistik setelah selesai sortir terhitung sebanyak 767.628 lembar dengan rincian 767.208 surat suara kondisi baik

dan 420 lembar kondisi rusak.

“Kelebihan surat suara dari percetakan karena penyortiran dan menghitung ulang jumlahnya lebih. Ketika terjadi kelebihan surat suara, sesuai dengan peraturan, kelebihan itu harus dimusnahkan,” jelasnya.

Terkait dengan logistik Pilkada di Bantul, Joko mengatakan bahwa semua kelengkapan utama sudah masuk ke gudang logistik KPU setempat, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, segel, kabel ties, dan alat kelengkapan di tempat pemungutan suara (TPS) lainnya.

“Semua sudah masuk, tinggal yang belum masuk itu seperti alat untuk mencoblos itu belum, kemudian bantalan untuk coblos belum, masih dalam pengadaan,” ujarnya. **(Jdm)-d**

DUKUNG PROGRAM PANGAN GIZI DKPP Bantul Siapkan Gapoktan



Petani Kabupaten Bantul sedang mengolah sawah.

KR-Sukro Riyadi

BANTUL (KR) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menyiapkan para gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di setiap kelurahan atau desa untuk menyuplai bahan pangan guna mendukung program pangan dan gizi.

“Dengan adanya program pangan dan gizi itu kami mempersilakan semua gapoktan untuk mencari siapa yang akan memasak, biar gapoktan yang mengisi bahan baku,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, Minggu (27/10).

Diungkapkan, gapoktan yang ada di Bantul selama ini memproduksi hasil panen berlebih, misalnya gapoktan dari Bantul beberapa waktu lalu yang telah memasok beras kualitas premium untuk kebutuhan pangan di Pasar Beringharjo

Yogyakarta.

“Saya mempersilakan gapoktan, kalau siap ya *mangga*, seperti Gapoktan Srihardono Pundong yang telah memproduksi beras organik itu silakan mencari ‘link-link’ atau jaringan yang mungkin bisa menyuplai bahan pangan,” ungkapnya.

Joko mengatakan, di Kabupaten Bantul yang mempunyai 75 kelurahan masing-masing telah terdapat gapoktan yang terdiri atas beberapa kelompok tani, kemudian juga ada kelompok wanita tani (KWT) yang produksinya tidak hanya beras, namun juga sayuran, dan bahan pangan lain.

“Dengan begitu, harapan kami mereka bisa mendapatkan harga jual yang bagus, termasuk KWT yang mempunyai produk sayuran, atau peternak yang mempunyai produk telur, daging silakan, kita akan bantu

mencarikan link untuk pasarnya,” ujarnya.

Dalam menentukan gapoktan maupun produsen bahan baku yang menjadi pemasok pangan tidak ada seleksi, namun yang terpenting ada kerja sama dengan pihak ketiga yang menjadi pengolah bahan pangan menjadi pangan bergizi.

“Yang penting ada kerja sama, otomatis ada kesepakatan, namun bentuknya bagaimana dan kesepakatan seperti apa, kami tidak ikut *cawe-cawe*, namun tentu saja kami membantu mencarikan ‘link’ untuk pasar,” tuturnya.

Menurut Joko, Pemkab Bantul dengan Kota Yogyakarta telah bekerja sama, yang fokus utamanya dalam mengelola perekonomian, dan telah diwujudkan dalam suplai beras Gapoktan Bantul ke pasar yang ada di Yogyakarta. **(Zie)-d**

Pemasangan Ratusan APK Langgar Aturan

BANTUL (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul mencatat ratusan alat peraga kampanye (APK) dalam Pilkada 2024 yang pemasangannya melanggar Peraturan Bupati Bantul No 68 tentang Tata Cara Pemasangan APK.

“Sudah ada pemetaan APK yang secara tata cara pemasangannya melanggar perbup, seperti di wilayah Kecamatan Banguntapan, Pleret, Piyungan itu beda-beda jumlahnya, tapi masing-masing kecamatan di atas 100 APK,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho, Minggu (27/10).

Menurut Didik, temuan APK maupun bahan kampanye yang pemasangannya melanggar aturan itu belum yang terdapat di kecamatan lainnya, pihaknya menyebut jika tiap kecamatan ada 100 APK

yang melanggar, maka di 17 kecamatan se-Bantul jumlahnya bisa seribu lebih.

“Hanya saja itu rekomendasi kami, menjadi bagian APK yang kemudian harus ditertibkan, tetapi bila faktual di lapangan nanti kemudian APK yang harusnya ditertibkan tidak ada, itu menjadi bagian yang kemudian sudah menjadi inisiatif tim kampanye,” ujarnya.

Didik mengatakan, ratusan APK Pilkada Bantul yang pemasangannya melanggar aturan tersebut mayoritas karena di-

pasang di alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) atau dipasang yang jaraknya kurang dari 15 meter dari persimpangan jalan.

“Jadi di dalam Perbup Nomor 68 Pasal 4, kalau itu perempatan atau persimpangan tiga sudut, ketentuan APK itu masing-masing harus ditarik minimal 15 meter, nah itu rata-rata berada atau dipasang kurang dari 15 meter,” ungkapnya.

Selain itu, sebagian besar APK yang melanggar tersebut dipasang di pohon perindang tepi jalan, baik diikat maupun dipaku, ke-

mudian yang dipasang dengan cara diikat pada tiang listrik dan tiang telepon.

Didik juga mengatakan, terkait keberadaan APK atau bahan kampanye dari pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Bantul tersebut, akan dilakukan penertiban oleh Bawaslu bersama aparat pemerintah Satpol PP.

“Rencana penertiban APK nanti kita lakukan secara maraton mulai 28 Oktober sampai 1 November. Jadi rata-rata nanti, satu hari penertiban kita menjangkau tiga sampai empat kecamatan, harapannya nanti sampai 1 November itu merata di 17 kecamatan,” ujarnya. **(Zie)-d**



KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL, ARIF HARYANTO

Soroti BUMD, Pajak, Wisata, Pasar Rakyat Hingga Peredaran Miras

BANTUL (KR)- Ketua Komisi B, DPRD Kabupaten Bantul, Arif Haryanto mengungkapkan, jika terdapat beberapa agenda penting dan mendesak yang menjadi prioritas utama Komisi B periode 2024-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bersama Pemerintah Daerah Bantul ada beberapa hal yang menjadi tugas dari Komisi D yakni menyusun Peraturan Daerah, menetapkan APBD dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah Bantul.

“Bahkan Komisi B akan segera berkoordinasi dengan Dinas/Badan mitra kerja untuk segera melakukan pembahasan dengan prioritas mendesak diantaranya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi berbagai jenis pajak. Terutama PBB, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Restoran,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (28/10). Selain itu kata Arif, Komisi B DPRD Bantul juga bakal mendorong Dinas Pariwisata untuk segera mempersiapkan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di sepanjang kawasan pantai selatan seiring dengan akan segera dibukanya Jembatan Srandakan II.

Disamping itu, Komisi B akan mengkaji bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan setempat untuk optimalisasi pemungutan retribusi.

Tidak kalah penting, sektor UMKM dan Koperasi jadi fokus kerja ke depannya. Oleh karena itu akan segera dilakukan monitoring dan optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pasar rakyat. Tujuannya, untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pasar rakyat dite-



ngah persaingan global dan modernisasi teknologi.

Kemudian terkait dengan koperasi, Komisi B akan melakukan monitoring dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.Arif juga menyoroti toko swalayan. “Kami mendorong OPD terkait untuk segera melaksanakan penegakan peraturan daerah yang masih berlaku dan penertiban terhadap toko swalayan berjejaring yang melanggar aturan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan target itu,

Komisi B DPRD Bantul akan segera mengkoordinasikan DKUK MPP untuk mempersiapkan kembali penyusunan raperda baru tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang gagal disahkan pada periode lalu. ““Sedang untuk DPMPSTP kami akan dorong dalam penegakan Perda tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan,” jelasnya.

Arif Haryanto mengungkapkan, pihaknya juga mendorong agar Dinas Pariwisata Bantul mengoptimalkan penataan kawasan wisata pesisir Selatan. Termasuk mengoptimalkan penataan dan pengembangan kawasan agro wisata di Bukit Dermo yang telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus APBN tahun 2024. “Khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan kami ajak diskusi membahas detail pengajuan anggaran hibah Perumda Aneka Dharma untuk pengelolaan sampah di ITF Bawuran. Sedangkan PDAM Bantul optimalisasi pelayanan prima pada pelanggan, penyesuaian tarif dan pengembangan produksi air mineral dalam kemasan,” ujar Arif. **(Roy)**

KOMISI B		
• Ketua	: Arif Haryanto	(F-PKS)
• Wakil	: Edy Prabowo	(F-PUN)
• Sekretaris	: Dodi Purnomo Jati	(F-PDIP)
ANGGOTA		
• Theodora Ratna Widiastuti		(F-PDIP)
• Yasmuri		(F-PKB)
• Saryanto		(F-Gerindra)
• Jumirin		(F-Gerindra)
• Heru Sudibyo		(F-Golkar)
• Salsha Aurelia Daninsky		(F-PUN)